



EDISI SELASA 13 OKTOBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Pemerintah Bakal Bagi-bagi HP Gratis untuk Bansos

05

NUSANTARA
ISPA Tembus 14 Juta, Karhutla Indonesia Jadi Ancaman Lintas Negara

10

LISTSTYLE
Y3K, Tren Fashion Futuristik yang Terinspirasi Tahun 3000

BENCANA BELUM REDA, BNPBB KENA OTT KPK

Masih Ada 1.085 Titik Api di 6 Provinsi dan Total Sementara 2.096 Bencana Melanda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB), Selasa (13/10/2026). Ada 14 orang diamankan, salah satu pihak yang diamankan merupakan Sekretaris Utama (Sestama) BNPBB, Rustian. Dalam OTT ini, KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 1,4 miliar dan logam mulia emas. Diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPBB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Penindakan ini berlangsung ketika Indonesia masih berjibaku dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai kejadian bencana di sejumlah daerah. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI per 12 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, tercatat ada 1.085 titik panas (hotspot) berstatus kepercayaan tinggi di wilayah Indonesia, serta seluas 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas yang masih dalam proses pemadaman. Juga terdapat 2.096 total kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026. Bahkan sejumlah wilayah kluster bencana besar saat ini masih berada dalam masa transisi pemulihan intensif. Dari pagu anggaran, sebenarnya pemerintah mematok dana operasional reguler BNPBB di angka yang relatif kecil. Seperti Rp491 miliar pada tahun 2026, guna menjaga efisiensi belanja rutin birokrasi. Sebagai gantinya, penanganan kedaruratan di lapangan ditopang penuh oleh Dana Siap Pakai (DSP) yang fleksibel dan dapat dicairkan seketika saat status darurat ditetapkan. Pada tahun 2026 sendiri, realisasi penyerapan DSP tahap awal telah mencapai Rp4,62 triliun. Sementara untuk rencana tahun 2027, pemerintah kembali menyiagakan top-up dana on-call siap pakai sebesar Rp5 triliun di luar kenaikan pagu reguler komitmen mitigasi. Bersambung Hal. 11. Berita terkait Hal. 5

BENCANA ALAM (PERIODE 1 JANUARI 2026 - 13 OKTOBER 2026)

Total Jumlah
Kejadian Bencana di Indonesia
2.110 kejadian

Karhutla
938 kejadian
Banjir
578 kejadian

Cuaca Ekstrem
336 kejadian
Kekeringan
119 kejadian

Tanah Longsor
107 kejadian
Gempa bumi
14 kejadian

Erupsi Gunung
4 kejadian
Tsunami
0 kejadian

Dampak

421 Meninggal

5.745.257
Menderita dan Mengungsi

17 Hilang

3.257 Luka-luka

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti langit Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (13/10).ist.an

PEMERINTAH BAKAL BAGI-BAGI HP GRATIS UNTUK BANSOS

Pemerintah berencana membagikan telepon genggam (HP) kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Rencana tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pemerintah juga akan memfasilitasi pembukaan rekening bank gratis bagi warga yang belum memiliki akses perbankan.

Dalam pidatonya, Hashim mengatakan sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan pencatatan aktivitas ekonomis nasional.

"Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen dari populasi kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan," kata Hashim, Selasa (13/10/2026).

Untuk memperluas akses perbankan, pemerintah disebut telah memutuskan menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memilikinya. Biaya pembukaan rekening yang sebelumnya Rp50.000 direncanakan dihapuskan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut tanpa biaya awal.

Program tersebut tidak berhenti pada pembukaan rekening. Pemerintah juga merencanakan pemberian HP yang dilengkapi akun digital agar masyarakat dapat mengakses rekening dan menerima bantuan pemerintah secara elektronik.

"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing," ujar Hashim.

Melalui skema tersebut, penyaluran bansos yang selama ini dapat dilakukan secara tunai diarahkan menuju sistem digital. Pemerintah berharap dana bantuan bisa masuk langsung ke rekening penerima, sementara perangkat telepon genggam menjadi sarana untuk mengakses layanan keuangan tersebut.

Hashim mengaitkan digitalisasi transaksi dengan upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara. Menurut dia, aktivitas ekonomi yang belum tercatat dalam sistem formal perlu dijangkau agar transaksi masyarakat dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Langkah ini diharapkan membantu meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara lainnya.

Ia juga menyoroti rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang disebut



masih sekitar 12 persen. Pemerintah menargetkan rasio tersebut meningkat menjadi 18 persen. Digitalisasi, reformasi perpajakan, dan perbaikan administrasi penerimaan negara menjadi bagian dari upaya mencapai target tersebut.

Meski demikian, rencana pembagian HP gratis itu belum disertai penjelasan terperinci mengenai jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang akan dibagikan, kebutuhan anggaran, serta kriteria penerima. Mekanisme perubahan penyaluran bansos ke rekening digital, termasuk cara memastikan seluruh penerima dapat mengakses dana bantuan, juga belum dijelaskan secara lengkap.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas teknis pelaksanaan program rekening digital tersebut. Program itu ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

"Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah (awal 2027 berjalan programnya)," kata Airlangga di Fairmont Jakarta, Rabu (23/9).

Airlangga menjelaskan rekening tersebut nantinya direncanakan terhubung dengan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan secara terperinci persyaratan penerima bantuan HP gratis, termasuk apakah pembagiannya akan menyasar seluruh masyarakat atau kelompok tertentu.

Diketahui, pemerintah menetapkan target sasaran utama program bantuan sosial (bansos) reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan

Non-Tunai (BPNT/Sembako) mencapai sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain bansos reguler tersebut, intervensi penanganan kemiskinan juga diperluas melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan mampu menjangkau sekitar 16 juta siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Memasuki penyaluran Triwulan III, realisasi bantuan sosial telah menyentuh jutaan masyarakat yang membutuhkan secara bertahap. Hingga periode Juli sampai September, bantuan PKH tercatat telah tersalurkan kepada lebih dari 7 juta KPM, sementara program Sembako atau BPNT berhasil menjangkau lebih dari 12 juta KPM.

Demi menjaga ketepatan sasaran, pemutakhiran data terus dilakukan secara berkala berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasil dari evaluasi ini mencatat adanya 475.821 keluarga penerima baru yang masuk sebagai pengganti, sementara sekitar 11.014 KPM resmi dikeluarkan dari daftar karena dinilai sudah mampu, meninggal dunia, atau terdeteksi sebagai ASN, TNI, dan Polri.

Di sisi lain, Hashim Djojohadikusumo, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen. Target ambisius tersebut, menurut dia, bisa ditopang oleh pembangunan perumahan, perluasan akses internet, serta peningkatan produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Saya sangat optimistis dengan prospek kita. Pertumbuhan 8% memang ambisius. Saya rasa itu bisa dicapai. Saya rasa itu bisa dicapai," kata Hashim dalam Prasasti Indonesia

DAFTAR PROGRAM BANSOS / PERLINSOS

Program Keluarga Harapan (PKH)

- Jumlah Penerima / Target Kuota: 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Bansos Sembako / BPNT

- Jumlah Penerima / Target Kuota: 17,8 juta s.d 18,2 juta KPM

KIP Kuliah

- Jumlah Penerima / Target Kuota: 1,1 juta Mahasiswa

PBI Jaminan Kesehatan (JKN)

- Jumlah Penerima / Target Kuota: 96,8 juta jiwa

Bantuan Beras Tambahan

- Jumlah Penerima / Target Kuota: 33,24 juta KPM

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

- Jumlah Penerima / Target Kuota: 13,3 juta Pekerja

Rekening Bank Gratis (Baru 2027)

- Jumlah Penerima / Target Kuota: ~50 juta Warga Miskin



Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim menilai sektor konstruksi dan perumahan berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi karena memiliki keterkaitan dengan 185 kegiatan ekonomi lainnya. Pembangunan rumah, kata dia, akan ikut menggerakkan industri pendukung, mulai dari furnitur, semen, kayu, hingga kabel listrik. Ia merujuk pengalaman China yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen selama puluhan tahun.

"Ada 185 keterkaitan ekonomi dengan sektor konstruksi dan perumahan. Furnitur, semen, kayu, kabel listrik, ada 185 keterkaitan yang berbeda," ujarnya. Menurut Hashim, efek berantai dari sektor perumahan dapat memperluas aktivitas industri dan usaha yang terhubung dengan pembangunan. (gus,rls,ant/dya)

DPR SOROTI UTANG RP494 T BISA GERUS ANGGARAN PUBLIK

Pemerintah telah menarik pembiayaan utang Rp494,3 triliun hingga September 2026, ketika defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp319 triliun. DPR RI mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar target pembiayaan, tetapi juga memastikan beban utang tidak menggerus anggaran pembangunan dan pelayanan publik

Peringatan tersebut muncul di tengah rencana pembayaran bunga utang sebesar Rp599,4 triliun dalam APBN 2026. Besarnya kewajiban ini menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan untuk menilai seberapa leluasa pemerintah membiayai program pembangunan, menjaga layanan publik, dan merespons tekanan ekonomi.

"Secara nominal memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, hal ini belum otomatis menunjukkan perbaikan kesehatan fiskal, mengingat target pembiayaan dari utang meningkat. Meski Kemenkeu menyatakan masih on track, pertanyaan utamanya adalah kemampuan negara menanggung biaya utangnya," ujar Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi pembiayaan utang hingga 30 September 2026 mencapai 59,4 persen dari target APBN sebesar Rp832,2 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang Rp502,9 triliun atau 64,8 persen dari target Rp775,9 triliun. Dengan demikian, nominal pembiayaan utang tahun ini memang lebih rendah, tetapi target pembiayaannya justru lebih tinggi.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kondisi fiskal masih terkendali. Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (9/10/2026), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pelaksanaan APBN masih sesuai rencana. Hingga akhir



Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak

September, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu. Selisih keduanya menghasilkan defisit Rp319 triliun, setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Beban Bunga Utang Rp600 T

Amin menilai besarnya pembayaran bunga utang perlu menjadi perhatian karena dapat mempersempit ruang fiskal. Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah merencanakan pembayaran bunga utang sebesar Rp599,44 triliun, naik 8,6 persen dibandingkan proyeksi realisasi (outlook) 2025 sebesar Rp552,15 triliun.

Dari total tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri direncanakan mencapai Rp538,70 triliun, sedangkan bunga utang luar

negeri sebesar Rp60,74 triliun. Sebagai perbandingan, pembayaran bunga utang pada 2021 tercatat Rp343,5 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp386,3 triliun pada 2022, Rp439,9 triliun pada 2023, dan Rp488,4 triliun pada 2024. Proyeksi 2026 menunjukkan kenaikan sekitar 74,5 persen dibandingkan 2021.

Menurut Amin, besarnya rasio utang terhadap PDB saja tidak cukup untuk menggambarkan kesehatan keuangan negara. Pemerintah juga perlu memantau perbandingan pembayaran bunga dengan penerimaan pajak serta kebutuhan pembiayaan bruto, yakni total kebutuhan pendanaan sebelum memperhitungkan sumber pembiayaan yang tersedia.

"Rasio utang terhadap PDB saja tidak cukup untuk menilai kesehatan fiskal. Rasio bunga terhadap penerimaan pajak dan kebutuhan pembiayaan bruto juga harus kita awasi," tegasnya.

Pembiayaan Utang Hingga September 2026

RP 494,3 TRILIUN

(59,4% dari target pembiayaan utang APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun)

Defisit APBN

Rp319T | 1,24% terhadap PDB

Target utang 2026

Rp832,2T | Dalam APBN 2026

Bunga utang 2026

Rp599,4T | Rencana pembayaran

Pembiayaan utang 2025

Rp502,9T | Realisasi hingga September

Ia merujuk teori intertemporal budget constraint, yang menempatkan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban fiskal pada masa mendatang sebagai salah satu ukuran keberlanjutan utang. Dalam kerangka tersebut, utang dapat dibenarkan apabila digunakan untuk kegiatan produktif yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat penerimaan negara. (tin,rls,kum/dya)

Mekanisme Diubah, Pemerintah Dahulukan Pokok Utang Pajak

Pemerintah mengubah mekanisme pembayaran utang pajak dengan mendahulukan pelunasan pokok utang dibandingkan sanksi administratif. Perubahan ini diharapkan mempermudah wajib pajak menyelesaikan kewajibannya sekaligus membuka kesempatan memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.

Peraturan ini mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penyesuaian mekanisme pembayaran memungkinkan dana yang disetorkan wajib pajak terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak.

"Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bimo dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/10/2026).

Selain mengatur mekanisme pembayaran, PMK 71/2026 menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan serta memperjelas ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Namun, sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan

melalui mekanisme dalam peraturan tersebut.

Bimo menegaskan, perubahan mekanisme ini bukan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban wajib pajak untuk melunasi pokok utangnya. Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi tetap diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga mencantumkan ketentuan peralihan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan baru tersebut. (gus,ist/dya)

MENDADAK RALINE SHAH MUNDUR DARI STAFSUS KOMDIGI

Raline Shah mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Pengunduran diri aktris tersebut berlaku efektif pada Selasa (13/10/2026), setelah menjalankan tugasnya di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sekitar 1 tahun 9 bulan sejak Januari 2025.

Keputusan itu diambil setelah Raline mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional yang terus berkembang, termasuk keberlanjutan kariernya di industri hiburan. Meski meninggalkan jabatan di pemerintahan, ia menyatakan tetap mendukung agenda transformasi digital Indonesia.

"Secara nasional harga cabai m" Saya sangat bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengabdikan. Ini merupakan pengalaman yang sangat berarti, dan saya merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke babak berikutnya dalam perjalanan profesional saya," kata Raline dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (13/10/2026).

Raline menyampaikan apresiasi kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid atas kepercayaan, arahan, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam pelayanan publik. Selama menjabat, ia berperan dalam upaya memperkuat kemitraan global Komdigi serta mendorong edukasi dan literasi digital masyarakat.

Sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan keamanan digital dan perlindungan anak di ruang siber juga menjadi bagian dari agenda kementerian selama masa tugasnya.

Salah satu agenda penting Komdigi pada periode tersebut adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, keterangan pengunduran diri tersebut tidak merinci program spesifik yang secara langsung dipimpin atau menjadi tanggung jawab Raline dalam implementasi aturan itu.

Meutya Hafid menghormati keputusan Raline untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya. "Kami mengapresiasi kontribusi Raline selama menjalankan tugasnya di Kementerian dan menghormati keputusannya untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya. Kami tetap berterima kasih atas dukungan Raline terhadap agenda transformasi digital Indonesia," kata Meutya dalam keterangan yang sama.



Staf Khusus Menkomdigi Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Raline Shah (tengah).

Raline juga akan mendukung proses transisi tanggung jawab dan kegiatan yang masih berjalan untuk menjaga keberlanjutan program di lingkungan Komdigi. Pengunduran dirinya berlaku efektif pada 13 Oktober 2026. Belum ada keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai pengganti Raline ataupun perubahan pembagian tugas setelah ia meninggalkan jabatan tersebut.

Kritik Awal Masa Jabatan

Penunjukan Raline pada Januari 2025 sempat menjadi perhatian publik. Saat pelantikan, Meutya menjelaskan bahwa Raline dipilih bukan semata-mata karena popularitasnya sebagai selebritas, melainkan karena latar belakangnya sebagai pekerja seni dan jaringan internasional yang dimilikinya. Pemerintah berharap figur yang dekat dengan masyarakat dapat membantu menyampaikan edukasi digital, terutama kepada anak-anak dan generasi muda.

Dalam pemberitaan pada 13 Januari 2025, Meutya mengatakan orang tua banyak menyampaikan kekhawatiran tentang penggunaan internet oleh anak-anak. Karena itu, Raline diberi tugas membantu memperluas edukasi mengenai pemanfaatan ruang digital secara bijak dan bermanfaat. Pada hari pelantikan, Raline juga menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dengan jam kerja yang telah ditentukan. Ia menyebut rencana peninjauan kemitraan dengan perusahaan swasta dan pemerintah di luar negeri, termasuk Singapura dan India.

Namun, perjalanan Raline di jabatan tersebut juga mendapat sorotan warganet. Pada awal masa

tugasnya, unggahan foto saat menghadiri acara jenama fesyen Louis Vuitton di Singapura menuai kritik. Sejumlah warganet mempertanyakan kesesuaian aktivitas yang ditampilkan di media sosial dengan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang menangani kemitraan global dan edukasi digital. Kritik tersebut merupakan respons sebagian pengguna media sosial, bukan bukti bahwa Raline tidak menjalankan tugasnya.

Dalam keterangan pengunduran diri pada 13 Oktober 2026, Raline tidak menyebut kritik warganet itu sebagai alasan mundur. Ia secara resmi mengaitkan keputusannya dengan pertimbangan personal dan profesional, termasuk keberlanjutan karier di industri hiburan. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran dirinya merupakan akibat langsung dari polemik tersebut.

Diketahui, Raline Rahmat Shah dikenal sebagai aktris, model, dan figur publik Indonesia yang berkiprah di industri hiburan sejak awal 2010-an. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi salah satu finalis Puteri Indonesia 2008 yang mewakili Sumatera Utara. Ia kemudian menapaki karier di dunia film dan dikenal melalui sejumlah judul layar lebar, termasuk 5 cm dan Surga yang Tak Dirindukan.

Selain berakting, Raline aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan memiliki jejaring pergaulan internasional. Latar belakang tersebut menjadi salah satu pertimbangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid ketika menunjuknya sebagai Staf Khusus Menkomdigi Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital pada Januari 2025. Pemerintah berharap

Biodata Utama

- **Nama Lengkap**
Raline Rahmat Shah
- **Tempat, Tanggal Lahir**
Jakarta, 4 Maret 1985
- **Keturunan**
Melayu, Tionghoa, dan Pakistan
- **Pendidikan**
Bachelor of Arts (Political Science and New Media & Communication),
National University of Singapore (NUS)
- **Jabatan**
Staf Khusus Menkomdigi Bidang
Kemitraan Global & Edukasi Digital
(Dilantik 2026)

Perjalanan Karier & Prestasi

- **2008**
Meraih gelar Puteri Indonesia Favorit mewakili Sumatera Utara.
- **2012**
Debut akting legendaris sebagai Riani di film blockbuster 5 cm.
- **2015**
Memenangkan Pemeran Pendukung Wanita Terbaik di Festival Film Bandung (Surga Yang Tak Dirindukan).
- **2017**
Terjun ke dunia korporat sebagai Direktur Independen Indonesia AirAsia.
- **2025-2026**
Resmi dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital. Pada 13/10/2026 mengundurkan diri.

pengalaman Raline sebagai pekerja seni dan koneksi internasionalnya dapat mendukung penguatan kemitraan serta penyampaian edukasi digital kepada masyarakat.

Dalam pernyataan setelah penunjukannya, Raline menyatakan kesediaan menjalankan amanah tersebut dengan pembagian waktu kerja yang jelas. Ia juga menyampaikan rencana menjajaki kemitraan dengan perusahaan swasta dan pemerintah di luar negeri, termasuk Singapura dan India.

Penunjukan itu menempatkan-nya di antara figur dari luar birokrasi yang dilibatkan pemerintah untuk membantu menjalankan agenda komunikasi dan transformasi digital. Karier Raline di pemerintahan berjalannya berdampingan dengan aktivitasnya di industri hiburan. Pada awal masa jabatannya, unggahan foto saat menghadiri acara jenama Louis Vuitton di Singapura sempat menuai kritik di media sosial. (gus, ist, kim/dya)

ISPA TEMBUS 14 JUTA, KARHUTLA INDONESIA JADI ANCAMAN LINTAS NEGARA

Kabut asap tak hanya mengancam kesehatan warga di dalam negeri, tetapi juga menyelimuti Singapura dan Malaysia. Di tengah kebakaran yang disebut paling intens dalam 11 tahun terakhir, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 14.088.945 laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Indonesia hingga minggu epidemiologi ke-38 tahun 2026.



Seorang pejalan kaki yang mengenakan masker berjalan di sepanjang kawasan Marina Bay, sementara gedung-gedung tampak diselimuti kabut asap di Singapura pada 12 Oktober 2026. Dok.afp

Angka tersebut tercatat dalam Situation Report Penyakit Infeksi Emerging dan Potensial KLB/Wabah. Jumlah laporan pada tahun ini disebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Lonjakan laporan ISPA terlihat selama musim kemarau, terutama pada Juli hingga September. Pada minggu epidemiologi ke-27 sampai ke-31, laporan kasus bahkan melampaui 400.000 per minggu. Angka itu bertahan tinggi pada minggu ke-32 hingga ke-37, dengan laporan sekitar 420.000 kasus setiap pekan.

Meski berlangsung bersamaan dengan meningkatnya penanganan karhutla, kenaikan laporan ISPA tidak serta-merta membuktikan bahwa kebakaran menjadi satu-satunya penyebab. Faktor lain, seperti infeksi saluran pernapasan, kepadatan penduduk, kondisi kesehatan masyarakat, serta cakupan pemeriksaan dan pelaporan, juga perlu diperhitungkan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi memperberat gangguan pernapasan, terutama di wilayah dengan kualitas udara buruk.

Jawa Barat Tertinggi

Berdasarkan data Kemenkes yang dikutip BeritaSatu pada Selasa (13/10/2026), Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan ISPA terbanyak, yakni 2.533.888 kasus. Jawa Tengah menyusul dengan 2.358.930 kasus, sedangkan DKI Jakarta mencatat 1.600.814 kasus.

Jawa Timur berada di posisi keempat dengan 1.374.373 kasus, disusul Banten sebanyak 832.031 kasus. Lima provinsi lainnya yang masuk daftar sepuluh besar adalah Sulawesi Selatan dengan 408.777 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 388.380 kasus, Sumatera Utara 364.050 kasus, Sumatera Barat 337.208 kasus, dan Nusa Tenggara Barat 331.953 kasus.

Tingginya angka laporan di sejumlah provinsi di Pulau Jawa tidak otomatis menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami karhutla paling parah. Jumlah penduduk, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta sistem pencatatan kasus turut memengaruhi angka yang terhimpun. Data ISPA juga tidak dapat disamakan dengan data lahan terbakar maupun tingkat pencemaran udara.

Ancaman kesehatan menjadi lebih nyata ketika angka tersebut dibaca bersama kondisi kualitas udara di daerah terdampak kebakaran. Berdasarkan data pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada 13 Oktober 2026 pukul 10.52 WIB, Palangka Raya, khususnya Kecamatan Jekan Raya, mencatat angka 1.258. Kabupaten Katingan berada di urutan berikutnya dengan 859, disusul Kabupaten Barito Selatan di Sanggu sebesar 645.

Lokasi lain yang masuk daftar pemantauan dengan angka ISPU tertinggi meliputi Kabupaten Penukal Abab Lematang sebesar 522, Kabupaten Gunung Mas 514, Palembang di Bukit Kecil 483, Kabupaten Kotawaringin Timur 445, Kabupaten Muaro Jambi 375,

Jambi di Paal Lima 348, dan Kabupaten Musi Rawas 319.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak karhutla. Menurut dia, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus mencakup kesehatan, keselamatan, keberlangsungan pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga warga.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Puan menilai keluarga terdampak membutuhkan kepastian dukungan selama krisis berlangsung, terutama ketika mereka harus menjaga keselamatan anak-anak sekaligus mempertahankan penghasilan. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah mengintegrasikan pemadaman dengan kebijakan perlindungan sosial, termasuk menyesuaikan kegiatan sekolah dan aktivitas masyarakat berdasarkan kondisi di lapangan.

"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan," tuturnya.

Data Kemenkes yang disampaikan pada September lalu menunjukkan dampak langsung karhutla juga menimbulkan korban luka dan meninggal. Hingga 9 September 2026

RINCIAN NEGARA YANG TERDAMPAK KARHUTLA RI

Malaysia

- Polusi udara mencapai kategori sangat tidak sehat (API di atas 203).
- Sekolah di sejumlah wilayah ditutup, jutaan siswa belajar daring.
- Firefly membatalkan rute Kuala Lumpur-Singapura.

Singapura

- Sempat mengalami polusi udara sangat tidak sehat.
- Aktivitas luar ruangan, termasuk F1, terdampak.
- Pemerintah menyiapkan masker N95.

Brunei Darussalam

- Kualitas udara dan jarak pandang menurun.
- Mendesak pembahasan asap lintas negara di tingkat ASEAN.

Filipina

- Kabut asap mengganggu aktivitas, mengurangi jarak pandang, dan memicu kewaspadaan kesehatan.

Thailand

- Asap kiriman angin menyebabkan penurunan kualitas udara secara musiman.

Vietnam Selatan

- Kabut asap tipis menurunkan kualitas udara di wilayah perkotaan.



pukul 15.00 WIB, tercatat 347 orang terluka dan empat orang meninggal di wilayah terdampak di Kalimantan dan Sumatra. Rinciannya, Kalimantan Selatan mencatat dua korban luka berat dan tiga luka ringan; Kalimantan Tengah mencatat 313 luka berat dan tiga kematian; sedangkan Kalimantan Barat mencatat sembilan luka berat, 19 luka ringan, dan satu kematian. (wid,ist,kum/dya)

Akui Kayutangan Sisi Utara Sepi, Pemkot Gagah Hiburan Musik hingga Pokdarwis Baru



MALANG- Upaya menghidupkan kawasan Kayutangan sisi utara yang dinilai masih sepi pengunjung terus didorong melalui sejumlah opsi pengembangan. Mulai dari rencana menghadirkan hiburan musik hingga usulan pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) baru yang secara

menghidupkan kawasan utara sebelumnya telah dilakukan melalui kegiatan Pasar Srampat yang digagas pengelola Hotel Trio. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pematik aktivitas wisata sekaligus mendorong persebaran kunjungan agar tidak hanya terkonsentrasi di Kayutangan sisi selatan

khusus berfokus pada pengembangan kawasan tersebut.

"Kalau memang harus ditambah untuk musik yang ada di sana, nanti teman-teman band binaan dari Disporapar kami tampilkan juga untuk bisa menarik wisatawan hadir di sebelah utara," ujar Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, upaya

atau yang dikenal dengan Kayutangan Heritage.

Arif menilai, dominasi pertokoan di kawasan utara membuat aktivitas cenderung berkurang pada sore hingga malam hari. Akibatnya, pilihan tempat untuk bersantai maupun menikmati hiburan pada malam hari masih terbatas.

Di sisi lain, Penasihat Arsitektur Tata Kota sekaligus penggagas Kampung Kayutangan Heritage, Ir. Budi Fathony, mengusulkan pembentukan Pokdarwis Skabrom Heritage. Nama tersebut merupakan singkatan dari Jalan Semeru, kawasan Kayutangan, dan Jalan Bromo, yang menurut Budi telah dikenal sejak dahulu.

Usulan tersebut dimaksudkan agar pengembangan wisata Kayutangan sisi utara memiliki fokus tersendiri. Meski saat ini telah terdapat Pokdarwis Kampong Heritage Kajoetangan, Budi menilai penguatan kelembagaan masyarakat diperlukan untuk mendorong pengelolaan potensi wisata di kawasan tersebut.

Disebutkannya, Kayutangan sisi utara memiliki sejumlah potensi sejarah yang belum tergarap optimal. Di antaranya

pintu air bersejarah, rumah-rumah tempo dulu, bangunan cagar budaya, pernak-pernik pecah belah, hingga monumen Stadsklok yang dinilai memiliki daya tarik tersendiri.

Lebih lanjut, menurut Budi, pengembangan kawasan tidak cukup hanya dengan menghadirkan keramaian di koridor jalan. Karakter heritage perlu tetap dipertahankan, sementara potensi ekonomi warga dapat dikembangkan melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Gagasan pengembangan Kayutangan sisi utara itu sebenarnya sudah dibahas sejak sebelum pandemi Covid-19. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena pengurus di wilayah belum cukup proaktif," paparnya.

Selain mengembangkan UMKM, Budi menilai penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event dapat menjadi alternatif untuk menarik pengunjung. Kegiatan tersebut bisa digelar di dalam kampung maupun di area koridor luar, dengan memanfaatkan potensi yang sudah tersedia. (Santi/Dya)

Soroti Kesiapan e-Voting Pilkadaes 2027, DPRD Malang Pertanyaan Infrastruktur

MALANG - Rencana penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Malang 2027 menjadi sorotan DPRD setempat. Legislatif meminta pemerintah daerah mengkaji kesiapan infrastruktur, mulai dari jaringan internet dan pasokan listrik hingga kemampuan sumber daya manusia (SDM), sebelum menentukan sistem pemungutan suara yang akan digunakan.

"Kami meminta supaya penggunaan e-voting ini dikaji terlebih dahulu dengan matang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari kesiapan SDM, masyarakat sebagai pemilih maupun panitia pelaksana, hingga kesiapan infrastruktur wilayah," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, Selasa (13/10/2026).

Diketahui, sebanyak 210 desa dari total 378 desa di Kabupaten Malang dijadwalkan menggelar Pilkadaes serentak pada 2027 mendatang. Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan desa dan kondisi geografis yang beragam, penentuan metode pemungutan suara dinilai dewan

membutuhkan perencanaan matang, termasuk dari sisi kebutuhan anggaran.

Wacana penerapan e-voting tersebut mencuat dalam rapat koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pertemuan itu, Kemendagri mengusulkan agar Pemkab Malang mempertimbangkan sistem pemungutan suara elektronik yang telah diterapkan di sejumlah desa di luar Jawa.

Di Kabupaten Malang, salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah pemerataan akses internet. Faza menyebut, sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan sinyal atau masuk kategori blank spot. Kondisi ini perlu dipetakan sebelum pemerintah menentukan desa yang dapat menerapkan pemungutan suara elektronik.

Pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk memilah desa yang memungkinkan menggunakan e-voting dan desa yang masih perlu

mengandalkan metode konvensional atau pemungutan suara secara manual.

"Pemetaan sangat diperlukan untuk mengetahui desa mana yang memungkinkan menerapkan e-voting dan wilayah mana yang masih membutuhkan pemungutan suara secara manual," tambahnya.

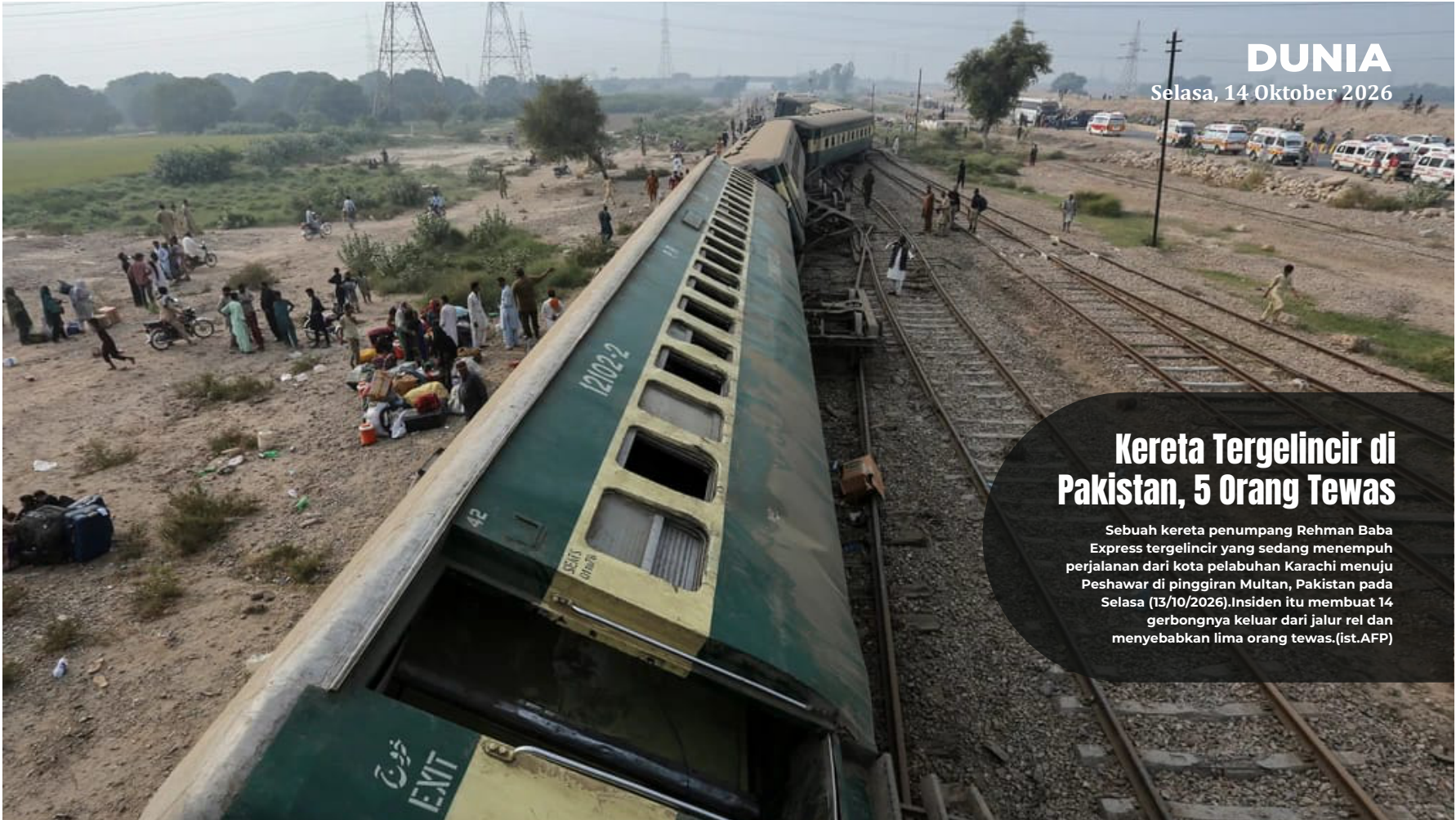
Selain jaringan internet, ketersediaan pasokan listrik dan kemampuan pemilih maupun panitia dalam mengoperasikan perangkat digital juga perlu dipastikan. Tanpa dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai, pelaksanaan pemungutan suara berisiko terkendala persoalan teknis.

Di sisi lain, Faza mengakui sistem e-voting berpotensi mempercepat proses penghitungan suara dibandingkan metode manual. Meski demikian, keuntungan tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya



pertimbangan dalam menentukan sistem pemilihan.

DPRD Kabupaten Malang, lanjutnya, masih menunggu hasil kajian pemerintah daerah sebelum menentukan metode yang akan diterapkan dalam Pilkadaes 2027. Pemerintah diminta mempertimbangkan tiga opsi, yakni pemungutan suara manual, sistem kombinasi atau hybrid, maupun penerapan e-voting sepenuhnya. (Santi/Dya)



Kereta Tergelincir di Pakistan, 5 Orang Tewas

Sebuah kereta penumpang Rehman Baba Express tergelincir yang sedang menempuh perjalanan dari kota pelabuhan Karachi menuju Peshawar di pinggiran Multan, Pakistan pada Selasa (13/10/2026). Insiden itu membuat 14 gerbongnya keluar dari jalur rel dan menyebabkan lima orang tewas. (ist.AFP)

BEBAN NEGARA MEMBENGKAK, THAILAND PANGKAS ASN BESAR-BESARAN

Pemerintah Thailand merancang program pensiun dini besar-besaran bagi pegawai negeri sipil (PNS) mulai tahun anggaran 2027. Langkah ini untuk mengurangi belanja negara dan memperkuat ruang fiskal. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan jumlah pegawai sektor publik hingga 5 persen setiap tahun. Namun, pelaksanaannya membutuhkan anggaran awal sekitar 7 miliar baht atau setara Rp 3,73 triliun untuk membayar kompensasi pegawai yang memilih mengikuti program itu.

Wakil Perdana Menteri Thailand Pakorn Nilprapunt mengatakan, pemerintah masih membahas besarnya kompensasi bersama Kementerian Keuangan. "Pemerintah sedang mempertimbangkan kompensasi lebih dari 12 kali gaji bulanan karyawan, tetapi jumlah pastinya masih dibahas dengan Kementerian Keuangan," kata Pakorn, sebagaimana dikutip The Straits Times, Selasa (13/10/2026).

Instansi terkait masih menyelesaikan rincian kebijakan sebelum mengajukannya kepada kabinet untuk mendapatkan persetujuan.

Pada tahap awal, program ini diprioritaskan bagi pegawai berusia 50 tahun ke atas.

Pegawai berusia 40–49 tahun juga berpeluang mengikuti pensiun dini dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki kondisi kesehatan yang buruk atau harus merawat anggota keluarga. Proposal

reformasi birokrasi yang diberitakan The Nation turut mengelompokkan calon peserta berdasarkan usia dan masa kerja. Kelompok pertama mencakup pegawai berusia minimal 50 tahun atau mereka yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 25 tahun. Kelompok kedua terdiri atas pegawai berusia 40–49 tahun dengan masa kerja minimal 10 tahun.

Kriteria tersebut masih mengacu pada proposal yang perlu difinalisasi pemerintah. Selain mengurangi jumlah pegawai, rancangan kebijakan tersebut diarahkan untuk merampingkan struktur birokrasi. Setiap pegawai yang keluar melalui program pensiun dini diusulkan diikuti penghapusan satu posisi dalam struktur pemerintahan.

Jabatan yang dihapus tidak harus sama dengan posisi yang ditinggalkan peserta, selama pengurangan tersebut tidak mengganggu tugas utama instansi. Skema ini dimaksudkan untuk menekan komitmen belanja jangka panjang, termasuk

pengeluaran untuk gaji dan pensiun pegawai baru.

Proposal itu juga memuat pembatasan bagi penerima kompensasi agar tidak kembali menjadi pegawai tetap di instansi pemerintah maupun organisasi sektor publik. Meski demikian, pekerjaan yang sebelumnya ditangani pegawai yang pensiun tidak harus dihentikan. Pemerintah dapat menggunakan tenaga dari luar untuk menjalankan pekerjaan tertentu, termasuk merekrut tenaga ahli teknologi guna mendukung transformasi digital dan pengembangan operasional pemerintahan berbasis digital.

Dengan demikian, pengurangan pegawai diarahkan sekaligus untuk menyesuaikan komposisi tenaga kerja dengan kebutuhan birokrasi.

Rencana tersebut muncul ketika pemerintah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berupaya memperkuat konsolidasi fiskal di tengah tingginya pengeluaran negara. Berdasarkan

laporan The Business Times yang dikutip Kompas.com, Thailand memiliki sekitar 1,7 juta pegawai negeri per Juni 2023.

Pemerintah memperkirakan belanja anggaran mendekati batas 70 persen yang telah ditetapkan. Pengurangan jumlah pegawai diharapkan memberikan ruang fiskal lebih besar untuk menghadapi kemungkinan guncangan ekonomi, meskipun pemerintah harus menanggung biaya kompensasi pada tahap awal.

Kantor Komisi Pegawai Negeri Sipil Thailand (Office of the Civil Service Commission/OCSC) masih membahas mekanisme pelaksanaan bersama instansi terkait. Rancangan tersebut selanjutnya akan diajukan kepada komite perencanaan dan kebijakan tenaga kerja publik serta kabinet sebelum diberlakukan secara resmi. Dengan demikian, target pengurangan pegawai 5 persen per tahun dan besaran kompensasi masih merupakan bagian dari rencana yang menunggu penyelesaian aturan, bukan kebijakan final yang telah berlaku.

Sejumlah negara menjalankan atau menyiapkan perampingan birokrasi pada 2026 untuk menekan belanja pemerintah, mengurangi defisit anggaran, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Kebijakan tersebut ditempuh melalui penghapusan jabatan, pengurangan jumlah pegawai, hingga pensiun dini. Rumania, Kanada, Amerika Serikat, dan Nepal menjadi contoh negara yang mengambil langkah berbeda dalam menata kembali jumlah aparatur pemerintah. (tin,rtr,ist,rls/dya)

Migrain Tiga Kali Lebih Sering Serang Perempuan, Apa Pemicunya?

Migrain bukan sekadar sakit kepala biasa. Kondisi neurologis ini dapat menyebabkan nyeri hebat, mual, muntah, gangguan penglihatan, hingga kesulitan berkonsentrasi. Perempuan tercatat tiga kali lebih mungkin mengalami migrain dibandingkan laki-laki, dengan perubahan hormon menjadi salah satu faktor yang menjelaskan perbedaan tersebut.

Migrain disebut memengaruhi sekitar satu dari tujuh orang di seluruh dunia atau lebih dari satu miliar orang, menurut badan amal Migraine Trust di Inggris. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat serangan berlangsung, tetapi juga dapat memengaruhi pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan mental.

Migrain merupakan kondisi neurologis yang memiliki komponen genetik. Otak penderita cenderung lebih sensitif terhadap berbagai perubahan, sehingga faktor tertentu dapat memicu rangkaian proses yang menghasilkan gejala migrain. Namun, tidak semua orang yang memiliki kecenderungan genetik akan mengalami serangan.

Dr Katy Munro, pakar migrain dari National Migraine Centre di Inggris, menjelaskan bahwa gejala migrain dapat berbeda pada setiap orang, bahkan pada anggota keluarga yang sama. Gejalanya juga dapat berubah sepanjang hidup seseorang.

Perubahan Hormon

Salah satu faktor yang menjelaskan tingginya kasus migrain pada perempuan adalah perubahan hormon sepanjang kehidupan. Menurut Munro, sekitar 10 persen anak-anak mengalami migrain, baik perempuan

maupun laki-laki. Perbedaan jumlah penderita mulai terlihat setelah pubertas, ketika anak perempuan memasuki siklus menstruasi.

Penurunan kadar estrogen menjelang menstruasi dapat memicu serangan migrain pada sebagian perempuan. Akibatnya, serangan dapat muncul berulang pada periode yang sama setiap bulan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perubahan hormon juga dapat memperburuk migrain selama perimenopause, yaitu masa transisi sebelum menopause. Pada periode ini, kadar hormon mengalami fluktuasi yang dapat memengaruhi pola serangan.

Munro menjelaskan, migrain pada masa perimenopause menjadi persoalan besar bagi banyak perempuan. Kondisi tersebut juga dapat beriringan dengan masalah tidur, tanggung jawab keluarga, serta tuntutan pekerjaan yang menambah beban fisik dan emosional.

Setelah menopause, sebagian perempuan mengalami serangan yang lebih jarang atau tidak terlalu parah. Hal ini dapat terjadi karena kadar hormon menjadi lebih stabil, meskipun perubahan tersebut tidak dialami semua orang.

Stres, Kurang Tidur dan Perubahan Cuaca

Perubahan hormon bukan satu-satunya pemicu migrain. Serangan biasanya berkaitan dengan kombinasi sejumlah faktor yang terakumulasi hingga melewati ambang toleransi tubuh seseorang. Stres merupakan salah satu faktor yang kerap berperan. Namun, serangan tidak selalu muncul ketika seseorang sedang menghadapi

tekanan. Periode tenang setelah masa yang penuh stres juga dapat memicu migrain. Pola tidur yang tidak teratur, tidur terlalu sedikit atau terlalu lama, serta melewatkan waktu makan juga dapat berkontribusi.

Perubahan kadar gula darah, dehidrasi, dan perubahan cuaca, termasuk suhu, kelembapan, serta tekanan atmosfer, dapat menjadi pemicu bagi sebagian penderita.

Selain itu, kondisi medis tertentu, seperti kekurangan zat besi, penyakit celiac, dan gangguan fungsi tiroid, dapat berkaitan dengan keluhan sakit kepala atau memperburuk kondisi seseorang. Jika serangan sering berulang, pemeriksaan medis diperlukan untuk menilai kemungkinan faktor penyerta tersebut.

Empat Tahap Migrain

Serangan migrain dapat berlangsung melalui empat tahap, meskipun tidak semua penderita mengalami seluruh tahap tersebut. Tahap pertama adalah prodrome, yaitu fase pertanda awal sebelum sakit kepala muncul. Gejalanya dapat berupa sering menguap, kelelahan, perubahan suasana hati, atau nyeri leher.

Tahap kedua adalah aura, yang dapat berlangsung hingga sekitar satu jam. Pada fase ini, sebagian penderita mengalami gangguan penglihatan berupa pola zig-zag, kilatan cahaya, atau bintik-bintik. Menurut laporan BBC, sekitar sepertiga penderita migrain mengalami aura. Tahap ketiga merupakan fase sakit kepala yang dapat berlangsung selama empat hingga 72 jam. Nyeri dapat disertai mual, muntah, pusing, dan kesulitan

berkonsentrasi. Tingkat keparahan serta kombinasi gejalanya berbeda pada setiap orang.

Tahap terakhir disebut postdrome, atau fase setelah serangan mereda. Penderita dapat merasa sangat lelah, sulit berkonsentrasi, atau belum sepenuhnya pulih meskipun nyeri kepala sudah berkurang.

Jaga Rutinitas

Pengelolaan migrain tidak hanya bergantung pada obat. Menjaga rutinitas harian dapat membantu sebagian penderita mengurangi risiko serangan.

Makan secara teratur menjadi salah satu langkah penting. Hindari melewatkan waktu makan, terutama jika kondisi tersebut membuat tubuh mudah mengalami penurunan kadar gula darah. Kebutuhan cairan juga perlu dipenuhi, khususnya ketika berolahraga atau beraktivitas di tengah cuaca panas.

Pola tidur yang konsisten turut berperan. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari. Perubahan jadwal yang terlalu besar pada akhir pekan dapat menjadi pemicu bagi sebagian penderita.

Olahraga tetap bermanfaat bagi kesehatan, tetapi pada sebagian orang aktivitas fisik yang berat dapat memicu serangan. Pastikan asupan makanan dan cairan mencukupi serta menyesuaikan intensitas olahraga dapat membantu mengurangi risiko tersebut.

Munro mencontohkan bahwa akhir pekan dapat menjadi periode yang rentan bagi sebagian penderita. (far,ist/dya)

Sac Actun, Labirin Gua Bawah Laut Meksiko



yang ditemukan di lokasi tertentu juga memberikan petunjuk tentang praktik ritual masa lampau. Kondisi gua yang relatif stabil memungkinkan sebagian artefak dan sisa organik bertahan selama ribuan tahun.

De Anda menggambarkan Sac Actun seperti terowongan waktu yang membawa peneliti kembali

sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun ke masa lalu.



Terhubung dengan Dos Ojos

Penelitian terhadap Sac Actun berlangsung selama beberapa

dekade. Sistem gua ini pertama kali ditemukan pada 26 November 1987. Eksplorasi berikutnya mengungkap jaringan lorong bawah tanah yang jauh lebih luas daripada perkiraan awal.

Pada 2018, penyelaman selama sekitar 10 bulan memastikan bahwa Sac Actun terhubung dengan sistem gua Dos Ojos. Keduanya kemudian dipahami sebagai bagian dari satu jaringan gua berkesinambungan dengan panjang terpetakan sekitar 347 kilometer. Jaringan tersebut terdiri atas lorong, ruang gua, dan saluran air yang berperan dalam sistem akuifer Semenanjung Yucatán. Air tanah di kawasan ini penting bagi ekosistem dan

kehidupan penduduk setempat. Sac Actun merupakan salah satu sistem gua bawah air terpanjang yang telah dipetakan di dunia. Kawasan ini juga termasuk dalam daftar 100 situs warisan geologi penting dunia yang disusun International Union of Geological Sciences (IUGS).

Bentang alam karst Yucatán terbentuk melalui proses pelarutan batuan kapur oleh air selama waktu geologis yang panjang. Proses tersebut menciptakan rongga, lorong, dan lubang alami yang kini menjadi bagian dari jaringan gua bawah tanah.

Selain memiliki nilai geologi, sistem gua ini membantu ilmuwan mempelajari perubahan lingkungan dan iklim masa lampau melalui endapan mineral, fosil, serta sisa organisme yang terawetkan.

Di balik nilai ilmiahnya, Sac Actun juga menyimpan risiko bagi penyelam. Lorong yang sempit, jarak pandang terbatas, serta kompleksitas jalur bawah air membuat eksplorasi memerlukan keterampilan dan perencanaan khusus.

Laporan yang dikutip detikEdu menyebut dua penyelam profesional meninggal dunia setelah tersesat di lorong gua bawah air tersebut. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa pengalaman menyelam di laut terbuka tidak otomatis membuat seseorang siap menghadapi sistem gua terendam. Sac Actun memperlihatkan bagaimana satu kawasan alam dapat menyimpan catatan geologi, ekologi, dan sejarah manusia sekaligus. Penelitian lanjutan terhadap jaringan gua ini berpotensi mengungkap lebih banyak informasi mengenai lingkungan purba dan kehidupan masyarakat. (farist/dya)

Di bawah Semenanjung Yucatán, Meksiko, terbentang labirin gua berisi air yang menyimpan jejak kehidupan manusia purba, peninggalan peradaban Maya, hingga sisa-sisa fauna yang telah punah. Sistem gua Sac Actun tidak hanya dikenal karena ukurannya, tetapi juga karena nilai arkeologi dan geologinya yang penting bagi penelitian sejarah manusia.

Sac Actun berarti "Gua Putih" dalam bahasa Maya. Sistem gua ini terbentuk pada batuan kapur dan terhubung dengan sejumlah cenote, yakni lubang alami yang terbentuk ketika atap gua runtuh.

Jejak Peradaban Maya

Sac Actun menyimpan berbagai peninggalan yang berkaitan dengan kehidupan dan ritual suku Maya.

Peneliti menemukan tembikar, struktur arkeologi, makam, serta sisa-sisa manusia dan hewan purba di dalam sistem gua tersebut.

Arkeolog bawah air Guillermo de Anda dari proyek Gran Acuífero Maya (GAM) mengatakan timnya telah mendokumentasikan lebih dari 100 unsur arkeologi, termasuk fauna yang telah punah, manusia purba, dan peninggalan Maya. Temuan itu menjadikan Sac Actun sebagai ruang penelitian penting untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungan pada masa lalu.

Bagi masyarakat Maya, sejumlah cenote memiliki makna religius dan dikaitkan dengan dunia bawah dalam kepercayaan mereka. Benda-benda



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Y3K, Tren Fashion Futuristik yang Terinspirasi Tahun 3000

Tren fashion terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Setelah Y2K yang menghidupkan kembali gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an, kini muncul Y3K, tren berpakaian dengan estetika futuristik yang membayangkan kehidupan manusia pada tahun 3000.

Y3K menawarkan tampilan berani, eksperimental, dan tidak konvensional. Berbeda dari gaya sehari-hari yang cenderung mengutamakan kesan kasual, tren ini bermain dengan siluet tidak biasa, material berkilau, warna metalik, hingga detail yang menyerupai busana dalam film fiksi ilmiah.

Gaya tersebut menarik perhatian pencinta fashion yang ingin tampil berbeda, terutama generasi muda yang menjadikan pakaian sebagai sarana mengekspresikan identitas dan kreativitas. Y3K juga cocok untuk acara musik, konser, maupun festival yang memberi ruang bagi penampilan eksentrik dan penuh karakter.

Salah satu referensi yang kerap dikaitkan dengan estetika ini adalah aesp, grup K-pop yang dikenal dengan konsep visual futuristik. Melalui perpaduan busana berkarakter tegas, riasan eksperimental, dan citra digital, aesp menghadirkan gambaran penampilan yang seolah berasal dari dunia masa depan.

Perbedaan Y3K dan Y2K

Y2K merujuk pada gaya yang terinspirasi pergantian milenium, terutama akhir 1990-an dan awal 2000-an. Tren tersebut identik dengan atasan pendek, celana berpotongan rendah, kacamata berwarna, aksesoris mencolok, serta nuansa pop yang populer pada era tersebut.

Sementara itu, Y3K membawa imajinasi lebih jauh ke masa depan. Jika Y2K menghidupkan kembali gaya masa lalu, Y3K lebih menonjolkan eksplorasi bentuk, tekstur, dan visual yang membayangkan perkembangan teknologi serta kehidupan pada tahun 3000.

Kendati demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam keberanian bereksperimen. Pakaian tidak sekadar berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari pernyataan gaya personal.

Y3K bukan berarti harus mengenakan kostum yang terlihat seperti robot. Unsur futuristik bisa diterapkan secara sederhana melalui satu atau dua elemen, misalnya tas

berpermukaan metalik, aksesoris geometris, atau atasan dengan potongan asimetris. Ada beberapa elemen yang dapat digunakan untuk mengenali sekaligus mengadaptasi tren Y3K dalam penampilan sehari-hari.

Warna Metalik dan Efek Krom

Perak, abu-abu metalik, serta warna dengan efek krom menjadi pilihan yang kuat untuk membangun kesan futuristik. Material reflektif dapat digunakan pada jaket, rok, celana, sepatu, atau aksesoris. Bagi yang belum terbiasa memakai busana berkilau dari kepala hingga kaki, aksen metalik pada tas atau sepatu bisa menjadi titik awal.

Siluet Tegas dan Potongan Tidak Biasa

Y3K memberi ruang bagi busana dengan bentuk eksperimental, seperti bahu tegas, potongan asimetris, detail bertumpuk, atau garis geometris. Bentuk tersebut menciptakan kesan modern tanpa harus mengandalkan banyak ornamen.

Material Mengilap dan Tekstur Futuristik

Kesan masa depan dapat dibangun melalui perpaduan bahan yang berbeda, seperti kulit sintetis, kain berlapis, material transparan, dan permukaan mengilap. Kontras tekstur membuat penampilan terlihat lebih dinamis.

Aksesoris Berkarakter Digital

Kacamata dengan bingkai unik, perhiasan geometris, sepatu berdesain tegas, serta tas dengan bentuk tidak lazim dapat memperkuat estetika Y3K. Pemilihan aksesoris sebaiknya tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kesesuaiannya dengan keseluruhan pakaian.

Riasan Eksperimental

Riasan juga berperan dalam membangun tampilan futuristik. Eyeshadow bernuansa perak, kilau pada sudut mata, eyeliner grafis, serta efek kulit bercahaya dapat menjadi pilihan. Namun, riasan tidak harus selalu dramatis. Sentuhan shimmer tipis pun dapat menghadirkan nuansa Y3K tanpa membuat penampilan terasa berlebihan. Salah satu tantangan mengikuti tren futuristik adalah

memadukan elemen eksperimental agar tetap nyaman dikenakan. Kuncinya terletak pada keseimbangan antara detail yang mencolok dan potongan busana yang lebih sederhana.

Untuk penampilan kasual, misalnya, padukan kaus polos dengan celana berpotongan tegas, sepatu metalik, dan tas berdesain geometris. Jika ingin tampil lebih berani saat menghadiri konser, jaket mengilap dapat dipadukan dengan atasan hitam dan aksesoris futuristik.

Sementara itu, bagi pencinta gaya minimalis, pilihan warna monokrom seperti hitam, putih, dan perak dapat menjadi kombinasi yang relatif mudah diterapkan. Permainan tekstur dan bentuk sudah cukup untuk membangun kesan futuristik tanpa harus menggunakan banyak warna.

Y3K pada akhirnya bukan aturan berpakaian yang kaku. Tren ini menawarkan ruang untuk mengolah imajinasi tentang

masa depan menjadi penampilan yang sesuai dengan kepribadian masing-masing.

Pengaruh Budaya Digital

Tren Y3K tidak hanya berkembang sebagai eksperimen berpakaian, tetapi juga berkaitan dengan pertemuan budaya pop, teknologi, dan identitas digital. Majalah internasional Vogue Arabia dalam artikel pada 2 Oktober 2026 menyoroti bagaimana estetika Y3K memperoleh perhatian seiring masuknya teknologi wearable ke industri fashion. Artikel tersebut juga mengaitkan tren futuristik dengan pengaruh kecerdasan buatan (AI), metaverse, dan budaya gim.

Pengaruh itu terlihat dalam perkembangan aksesoris dan rancangan busana yang menggabungkan fungsi dengan penampilan eksperimental. Kacamata berdesain futuristik, perhiasan berstruktur menyerupai objek digital, serta busana dengan permukaan metalik menjadi bagian dari eksplorasi tersebut. (farist/dya)



Bencana Belum Redadari Hal 1

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi penindakan tersebut. Sejumlah pihak telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan awal. Namun, hingga Selasa malam, KPK belum mengungkap identitas lengkap pihak-pihak yang ditangkap maupun perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut.

“Benar,” kata Setyo kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia menambahkan, “Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan.”

Setyo mengatakan informasi lebih terperinci mengenai pihak yang diamankan akan disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. KPK juga belum membeberkan dugaan tindak pidana yang sedang diusut dalam operasi tersebut. Dengan demikian, belum dapat dipastikan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi perkara yang sedang dialami penyidik.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, turut membenarkan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Ia menyebut penyidik masih mendalami perkara dan akan menggelar ekspose atau gelar perkara sebelum menyampaikan perkembangan secara resmi kepada publik.

“Memang benar bahwa hari ini kami melaksanakan kegiatan tangkap tangan di BNPB,” kata Asep kepada wartawan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Asep mengatakan KPK masih melakukan pendalaman dan akan membahas hasilnya dalam rapat internal. “Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lebih jelas setelah kita melakukan ekspose dan nanti akan disampaikan secara resmi di konferensi pers,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pihak yang diamankan masih berstatus terperiiksa, sehingga status hukum mereka belum dapat disamakan dengan tersangka.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT. Karena itu, pengumuman mengenai identitas, dugaan tindak pidana, serta pihak yang ditetapkan sebagai tersangka masih menunggu hasil pemeriksaan dan gelar perkara.

OTT yang berkaitan dengan BNPB ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut menangani sejumlah perkara melalui operasi serupa, mulai dari dugaan suap pemeriksaan pajak, perkara yang melibatkan kepala daerah, hingga dugaan korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga negara. Pada September 2026, KPK juga melakukan OTT terkait dugaan korupsi di



Sejumlah pasien terdampak gempa dievakuasi di halaman RS Siloam Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.dok

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Di tengah proses hukum tersebut, BNPB menyatakan menghormati langkah KPK dan meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan lembaganya akan bersikap kooperatif jika penyidik membutuhkan data maupun informasi.

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Berton kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Ia juga menyatakan BNPB tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan. Lembaga tersebut berkomitmen memberikan dukungan

data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, BNPB menegaskan pelayanan publik dan operasional penanggulangan bencana tetap berjalan normal.

Berton sebelumnya menyebut pihaknya belum mengetahui secara terperinci informasi mengenai operasi tersebut. Ia mengatakan, “Yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa.” Pernyataan itu merujuk pada kondisi di kantor BNPB pada rentang waktu yang ia sebutkan, sementara KPK membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan yang berkaitan dengan institusi tersebut. Peristiwa ini menempatkan BNPB dalam sorotan ketika lembaga tersebut masih terlibat dalam penanganan karhutla di berbagai wilayah.

Di luar perkara hukum tersebut, pekerjaan BNPB dalam

penanggulangan bencana masih berlangsung. Data yang dipublikasikan BNPB menunjukkan karhutla masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan, meskipun upaya pemadaman terus dilakukan.

Pada periode 24–30 September 2026, BNPB bersama tim gabungan melaporkan telah memadamkan karhutla seluas 3.799,73 hektare di enam provinsi prioritas. Sumatera Selatan mencatat luas pemadaman terbesar, yakni 1.554,46 hektare, disusul Kalimantan Tengah 846 hektare, Jambi 477,50 hektare, Kalimantan Barat 413,30 hektare, Kalimantan Selatan 349,44 hektare, dan Riau 96,03 hektare.

Penanganan karhutla menghadapi sejumlah kendala, terutama di lahan gambut dan lokasi yang sulit dijangkau. BNPB bersama unsur gabungan mengoptimalkan pemadaman darat dan udara, termasuk operasi water bombing serta modifikasi cuaca. Pada akhir September, lembaga tersebut melaporkan pengerahan 56 unit helikopter dan pesawat untuk mendukung patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air.

Ancaman kebakaran juga belum sepenuhnya mereda di Kalimantan Barat. BPBD setempat memperpanjang status tanggap darurat karhutla selama 14 hari, mulai 5 hingga 18 Oktober 2026. Keputusan itu diambil karena kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kayong Utara, Melawi, dan Mempawah, sementara kabut asap berpotensi memengaruhi kualitas udara di Kota Pontianak. (wid,rls,ant,kcm/dya)

Respons Lima Gubernur Kalimantan Disorot

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di Kalimantan memicu kritik terhadap respons lima gubernur di wilayah tersebut. Pernyataan dan tindakan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kalimantan Tengah Agustiari Sabran, Kalimantan Selatan Muhidin, Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dan Kalimantan Utara Zainal Paliwang menjadi sorotan publik. Kritik muncul ketika masyarakat masih menghadapi kebakaran dan kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Sorotan terbaru mengarah kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiari Sabran. Dalam video yang viral dari acara peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat pada awal Oktober 2026, Agustiari menyebut karhutla sebagai takdir, meski ia juga menegaskan kebakaran banyak dipicu ulah manusia.

Ia menyebut hampir 97 persen karhutla disebabkan manusia, lalu

melontarkan seloroh, “karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.” Pernyataan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan meminta Agustiari lebih mengayomi dan berempati saat menyampaikan pernyataan publik.

Sebelum Agustiari, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menuai kritik saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di Bundaran Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, pada 3 September 2026. Ria terlibat adu argumen ketika mahasiswa mengkritik penanganan karhutla. “Saya belum melihat mahasiswa turun kelokasi kebakaran lokasi kebakaran. Empat hari ini sayaturunkelapangansaya turun ke lapangan, tidak ada mahasiswa,” ujarnya.

Mahasiswa membantah pernyataan tersebut dan

menyatakan kelompok mereka ikut membantu pemadaman sebagai relawan. Ria juga sempat menunjukkan gestur hendak memukul sebelum dilerai rombongannya.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin turut disorot setelah menyebut kondisi karhutla di Banjarbaru pada 22 Agustus 2026 sudah “tidak parah lagi”. Ia menggunakan tidak adanya operasi water bombing saat itu sebagai salah satu indikator. “Heli pun enggak ada hari ini. Heli itu biasanya kalau parah pasti sudah water bombing atau siram-siram. Nah ini tidak ada terlihat, berarti tidak parah lagi,” katanya.

Pernyataan tersebut dikritik karena kabut asap masih dirasakan masyarakat. Pada Senin (12/10/2026), Muhidin meminta maaf karena pemerintah provinsi belum mampu menangani karhutla secara menyeluruh. Ia mengatakan fokus penanganan diarahkan untuk menjaga kawasan sekitar bandara. (wid,ist,tir/dya)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sejumlah penerbangan transit yang terhubung dengan Riyadh mengalami pembatalan, pengalihan rute, hingga penjadwalan ulang. Namun, gangguan tersebut tidak berarti seluruh penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi berhenti beroperasi.

Sejumlah penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah masih berjalan, meski beberapa maskapai menyesuaikan jadwal dan frekuensi penerbangannya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laiza menjelaskan, tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia menuju Riyadh. Penumpang dari Indonesia yang hendak menuju ibu kota Arab Saudi tersebut harus transit melalui sejumlah kota internasional.

“Operator penerbangan tidak ada yang melaksanakan penerbangan langsung ke Riyadh dari Indonesia, semuanya transit di Dubai, Abu Dhabi, Istanbul, India, dan lain-lain,” kata Lukman, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan, penerbangan lanjutan menuju Riyadh yang terdampak penutupan bandara dibatalkan. Meski demikian, penerbangan langsung dari Indonesia menuju sejumlah kota internasional, termasuk Doha, Dubai, Abu Dhabi, Istanbul, serta beberapa tujuan lain yang tercantum dalam pemantauan Kemenhub, masih beroperasi normal per 13 Oktober 2026.

Dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/10), Lukman mengatakan Kemenhub terus memantau perkembangan informasi dari Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA).

Pemerintah juga mengawasi dampak insiden keamanan terhadap operasional penerbangan internasional, khususnya perjalanan yang memiliki koneksi menuju atau dari Riyadh.

“Berdasarkan data pemantauan yang sama, penerbangan langsung dari Indonesia ke beberapa negara seperti Doha, India, Dubai, Abu Dhabi, Manila, Sri Lanka, Istanbul, Ethiopia, Oman yang tercantum dalam laporan masih beroperasi normal,” ujar Lukman.

Buntut Serangan Houthi di Atab Saudi INDONESIA MONITOR:

BANDARA RIYADH DITUTUP HINGGA 17 OKTOBER

Penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, diperpanjang hingga 17 Oktober 2026 setelah serangkaian serangan yang diklaim kelompok Houthi dari Yaman. Pemerintah Indonesia memonitor dampaknya terhadap penerbangan internasional. Termasuk perjalanan calon jemaah umrah yang menggunakan penerbangan transit menuju Arab Saudi.



Jemaah umrah di Makassar telantar di Bandara Sultan Hasanuddin imbas Bandara di Riyadh Saudi diserang Houthi. (Dok. Istimewa)

Sejumlah maskapai internasional turut menyesuaikan layanan. Qatar Airways membatalkan penerbangan rute Doha-Riyadh dan sebaliknya pada periode 9–17 Oktober 2026. Emirates juga membatalkan sejumlah penerbangan menuju dan dari Riyadh.

Maskapai lain melakukan penyesuaian koneksi, pengalihan rute, pembatalan penerbangan, atau penghentian sementara layanan menuju bandara tersebut.

Dampak penyesuaian penerbangan juga merembet ke sejumlah kota lain di Arab Saudi. Berdasarkan informasi operasional yang diterima pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Etihad Airways membatalkan penerbangan menuju Riyadh hingga 19 Oktober dan Dammam hingga 15 Oktober 2026.

Frekuensi penerbangan Etihad menuju Jeddah dikurangi dari empat menjadi dua kali sehari hingga 15

Oktober, sedangkan penerbangan menuju Madinah tetap beroperasi.

Emirates dilaporkan membatalkan penerbangan menuju Jeddah, Madinah, Riyadh, dan Dammam hingga waktu yang belum ditentukan. Oman Air dan Qatar Airways juga membatalkan penerbangan menuju Riyadh. Sementara itu, frekuensi penerbangan Qatar Airways menuju Jeddah dikurangi dari delapan menjadi empat kali sehari, sedangkan penerbangan menuju Madinah tetap beroperasi.

Saudia masih mengoperasikan penerbangan ke sejumlah kota di Arab Saudi, dengan pengecualian rute Riyadh yang terdampak penutupan bandara.

Asisten Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan memastikan penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan Madinah tetap berjalan berdasarkan pemantauan operasional. Bandara Soekarno-Hatta sendiri tidak melayani penerbangan langsung menuju Riyadh.

“Penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju Arab Saudi diimbau untuk memperhatikan informasi terbaru dari maskapai masing-masing, mengingat jadwal dan frekuensi penerbangan dapat berubah sesuai dengan kondisi

operasional,” kata Yudistiawan.

Berdasarkan data rencana operasional atau pre-ops Airport Operation Control Center (AOCC) untuk Selasa (13/10), Bandara Soekarno-Hatta mencatat rencana 40 penerbangan kedatangan dan 39 penerbangan keberangkatan dalam operasional yang dipantau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.629 penumpang diperkirakan merupakan jemaah umrah, terdiri atas 1.809 penumpang keberangkatan dan 1.820 penumpang kedatangan. Angka tersebut merupakan data rencana operasional, bukan jumlah penumpang yang telah dipastikan seluruhnya terbang.

Gangguan penerbangan transit sebelumnya juga menyebabkan 53 calon jemaah umrah di Makassar tertunda keberangkatannya pada Senin (12/10). Mereka terdampak pembatalan penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dari Kuala Lumpur menuju Madinah.

General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rully Artha, menjelaskan penerbangan MH846 dari Makassar menuju Kuala Lumpur tetap beroperasi dengan membawa 30 penumpang reguler. Dari total 83 penumpang yang direncanakan bepergian, 53 calon jemaah umrah tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai jadwal awal. (gus,rls,kum,ist/dya)

Aktivitas ibadah di Masjidil Haram, Kota Suci Makkah, Arab Saudi, tetap berlangsung kondusif setelah serangan yang terjadi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, pada Sabtu (10/10).

